



PROVINSI JAMBI

Jambi, 01 September 2026
Rabiul Awal 1448 H

Nomor : S-1712 /Diskominfo-3.1/IX/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Kepada:
Yth. Daftar terlampir
di -
Tempat

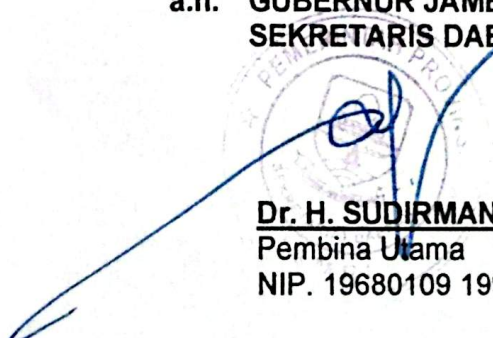
Menindaklanjuti Surat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 283 /KIP/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026 perihal Tahapan & Penyampaian SAQ Monev KIP Tahun 2026. Tahapan Monev sebagaimana dimaksud dimulai tanggal 27 Agustus s/d 26 September 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Sdr. Kepala OPD/Atasan PPID Pelaksana beserta Staf Admin Monev untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Pukul : 8.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi
Agenda : Penyampaian dan Pengumpulan data dukung pengisian monev SAQ Keterbukaan Informasi KI Pusat Tahun 2026 .

Demikian disampaikan atas kehadirannya untuk tidak diwakilkan dan terima kasih.

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
SEKRETARIS DAERAH,

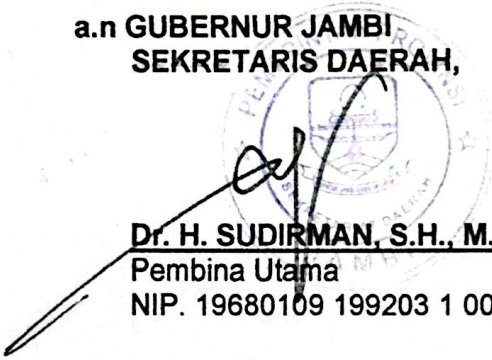

Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002

Lampiran : Surat Diskominfo Provinsi Jambi
Nomor : S-193 /Diskominfo-3.1/IX/2026
Tanggal : 01 September 2026

Kepada Yth Sdr :

1. Kepala Dinas Kominfo
2. Kepala Bappeda
3. Inspektur Inspektorat
4. Direktur Rumahsakit Umum Daerah Raden Mattaher
5. Kepala BKD
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Sekretaris DPRD
8. Kepala BKAD
9. Kepala Bappemda
10. Kepala Dinas Pendidikan
11. Kepala DPMPSTP
12. Kepala Dinas PUTR
13. Kepala Dinas Perkim
14. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
15. Kepala Biro Pemerintahan
16. Kepala Biro Hukum
17. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan

a.n GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002





1. Menyampaikan Informasi Khusus yang berkaitan dengan hak masyarakat
2. Program strategis dari OPD
3. Pengadaan Barjas 2 paket yang telah selesai lelang tahun 2026

Inspektorat

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah Provinsi;
Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025;
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2025;

Biro Organisasi

Daftar Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil
Daftar Dokumen profil pimpinan dan pegawai
Tugas dan fungsi serta kantor unit-unit dibawahnya
Struktur organisasi Pemerintah Provinsi

Biro Adpim

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2025
Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi (kalender kegiatan)

BAPPEDA

Menyediakan dokumen rencana strategis Kementerian/Lembaga/Badan yang masih berlaku

Mengumumkan program strategis atau prioritas Pemerintah Provinsi Tahun 2025 yang sekurang-kurangnya memuat nama program, besaran dan sumber anggaran, serta satuan kerja yang menangani (Sertakan informasi di website resmi Pemerintah Provinsi dan atau website SKPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah)

DPMPTSP DAN BIRO PEMERINTAHAN

Daftar Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2026 dan tertuang dalam DIP Tahun 2026. Surat perjanjian atau MoU yang tercantum dalam DIP.

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA :

2 PAKET STRATEGIS

Pemerintah Provinsi mengumumkan rencana umum pengadaan Tahun 2025
Sebutkan 2 (dua) pengadaan strategis Tahun 2025 yang TELAH SELESAI LELANG
a. Nama dan nilai Paket
b. Nama dan nilai Paket
Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang Tahun 2025 berupa:
a. Paket 1 (sebutkan nama paket)
b. Paket 2 (sebutkan nama paket)
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
Spesifikasi Teknis;
Rancangan Kontrak;
Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
Daftar Kuantitas dan Harga;

Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
Gambar Rancangan Pekerjaan;
Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
Dokumen Penawaran Administratif;
Surat Penawaran Penyedia;
Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Berita Acara Pemberian Penjelasan;
Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang Tahun 2025 berupa:
a. Paket 1 (sebutkan nama paket)

b. Paket 2 (sebutkan nama paket)
Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak
Surat Perintah Mulai Kerja
Surat Jaminan Pelaksanaan
Surat Jaminan Uang Muka
Surat Jaminan Pemeliharaan
Surat Tagihan
Surat Perintah Membayar
Surat Perintah Pencairan Dana
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
Pemerintah Provinsi memiliki regulasi internal yang menjamin transparansi pengadaan barang dan jasa
Pemerintah Provinsi memiliki sistem elektronik pengadaan barang dan jasa mandiri seperti misalnya https://biropbj.XXXprov.go.id/

Biro PBJ menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik. Misalnya informasi grafis jumlah paket, paket yang telah selesai lelang dan sebagainya
Biro PBJ menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen- dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik.
Biro PBJ menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat diakses publik. Misalnya daftar penyedia atau daftar hitam dan sejenisnya
Sistem Informasi elektronik Biro PBJ menyediakan mekanisme permohonan informasi

